

## **BAB III**

### **OBJEK DAN METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Objek Penelitian**

Objek penelitian atau variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu sasaran ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang suatu hal *subjectif*, *valid*, dan *reliable* tentang suatu hal (Sugiyono,2017).

Objek dalam penelitian ini sebagai variabel bebas adalah Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus dan objek variabel yang merupakan variabel terikat adalah Desentralisasi Fiskal. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintahan Kota Tasikmalaya di Jalan Letnan Harun No. 1 Tasikmalaya

##### **3.1.1 Sejarah dan Gambaran Umum Pemerintah Kota Tasikmalaya**

Yang dilansir dalam jabarprov (2019), Sejarah berdirinya Kota Tasikmalaya sebagai Daerah otonomi tidak terlepas dari sejarah berdirinya Kabupaten Tasikmalaya sebagai Daerah Kabupaten induknya. Maka rangkaian sejarah ini merupakan bagian dari rangkaian perjalanan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya sampai terbentuknya Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Pada waktu A. Bunyamin menjabat sebagai Bupati Tasikmalaya tahun 1976 sampai dengan 1981 tonggak sejarah lahirnya Kota Tasikmalaya dimulai dengan diresmikannya Kota Administratif Tasikmalaya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1976 oleh Menteri Dalam Negeri H. Amir Machmud. Peristiwa ini di tandai dengan penandatanganan prasasti yang sekarang terletak di depan gedung DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Pada waktu yang sama dilantik pula Walikota

Administratif Pertama yaitu Drs. H. Oman Roosman oleh Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat H. Aang Kunaefi.

Pada awal pembentukannya, wilayah Kota Administratif Tasikmalaya meliputi 3 Kecamatan yaitu Cipedes, Cihideung dan Tawang dengan jumlah Desa sebanyak 13 Desa. Berkat perjuangan unsur Pemerintahan Kabupaten Tasikmalaya yang dipimpin Bupati saat itu H. Suljana WH beserta tokoh masyarakat Kabupaten Tasikmalaya dirintislah pembentukan Kota Tasikmalaya dengan lahirnya tim sukses pembentukan Pemerintahan Kota Tasikmalaya yang diketuai oleh H. Yeng Ds. Partawinata SH. bersama tokoh - tokoh masyarakat lainnya. Melalui proses panjang akhirnya dibawah pimpinan Bupati Drs. Tatang Farhanul Hakim, pada tanggal 17 Oktober 2001 melalui Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001, Kota Tasikmalaya diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden RI di Jakarta bersama-sama dengan kota Lhoksumawe, Langsa, Padangsidempuan, Prabumulih, Lubuk Linggau, Pager Alam, Tanjung Pinang, Cimahi, Batu, dan Bau-bau.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya, telah mengantarkan Pemerintah Kota Administratif Tasikmalaya melewati pintu gerbang Daerah Otonomi Kota Tasikmalaya untuk menjadi daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pembentukan Pemerintah Kota Tasikmalaya tak lepas dari peran serta semua pihak maupun berbagai *steakholder* di Daerah Kota Tasikmalaya yang mendukung pembentukan tersebut. Tentunya dengan pembentukan Kota Tasikmalaya harus ditindak lanjuti dengan menyediakan berbagai prasarana maupun sarana guna menunjang

penyelenggaraan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Berbagai langkah untuk mempersiapkan prasarana, sarana maupun personil serta komponen-komponen lainnya guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Kota Tasikmalaya telah dilaksanakan sebagai tuntutan dari pembentukan daerah otonom itu sendiri.

Pada tanggal 18 Oktober 2001 pelantikan Drs. H. Wahyu Suradiharja sebagai PJ Walikota Tasikmalaya oleh Gubernur Jawa Barat dilaksanakan di Gedung Sate Bandung. Sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 2001 bahwa wilayah Kota Tasikmalaya terdiri dari 8 Kecamatan dengan jumlah Kelurahan sebanyak 15 dan Desa sebanyak 54, tetapi dalam perjalanannya melalui Peraturan Daerah No. 30 Tahun 2003 tentang perubahan status Desa menjadi Kelurahan, desa-desa dilingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya berubah statusnya menjadi Kelurahan, oleh karena itu maka jumlah Kelurahan menjadi sebanyak 69 Kelurahan, sedangkan kedelapan Kecamatan tersebut antara lain:

1. Tawang
2. Cipedes
3. Cihideung
4. Indihiang
5. Kawalu
6. Cibeureum
7. Tamansari
8. Mangkubumi

Sebagai salah satu syarat Pemerintah Daerah Otonom diperlukan alat kelengkapan lainnya berupa Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Melalui

Surat Keputusan No. 133 Tahun 2001 Tanggal 13 Desember 2001 Komisi Pemilihan Umum membentuk Panitia Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tasikmalaya (PPK-DPRD). Melalui proses dan tahapan-tahapan yang dilaksanakan PPK-DPRD Kota Tasikmalaya yang cukup panjang, maka pengangkatan anggota DPRD Kota Tasikmalaya di resmikan melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No. 171/Kep.380/Dekon/2002 Tanggal 26 April 2002, selanjutnya tanggal 30 April 2002 diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Tasikmalaya yang pertama kali.

Pada tanggal 14 November 2002 dilantiknya Bp. Drs. H. Bubun Bunyamin sebagai Walikota Tasikmalaya, pelantikan Walikota tersebut adalah sebagai puncak momentum dari pemilihan Kepala Daerah pertama di Kota Tasikmalaya sebagai hasil dari Tahapan proses pemilihan yang dilaksanakan oleh Legislatif.

Hingga saat ini Kota Tasikamalaya memiliki 69 Kelurahan dan 10 Kecamatan, yaitu:

**Tabel 3.1**  
**Daftar Kecamatan Di Lingkungan**  
**Pemerintah Kota Tasikmalaya**

| Kecamatan di Lingkungan Kota Tasikmalaya |               |
|--|---------------|
| 1. Tawang                                | 6. Kawalu     |
| 2. Cihideung                             | 7. Cibeureum  |
| 3. Cipedes                               | 8. Mangkubumi |
| 4. Indihiang                             | 9. Tamansari  |
| 5. Bungursari                            | 10. Purbaratu |

### 3.1.2 Visi dan Misi Kota Tasikmalaya

#### a. Visi Kota Tasikmalaya

Dilansir dalam jabarprov (2019) dengan berlandaskan Iman dan Taqwa, Kota Tasikmalaya menjadi pusat perdagangan dan industri termaju di Priangan Timur tahun 2012.

#### b. Misi Kota Tasikmalaya Dilansir dalam jabarprov (2019):

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia yang beriman dan bertaqwa
2. Meningkatkan kesadaran hukum dan menegakkan supremasi hukum
3. Menumbuhkan kekuatan ekonomi kota
4. Mengembangkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
5. Mengelola Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup secara berkelanjutan
6. Mengoptimalkan dan membangun sarana dan prasarana kota.

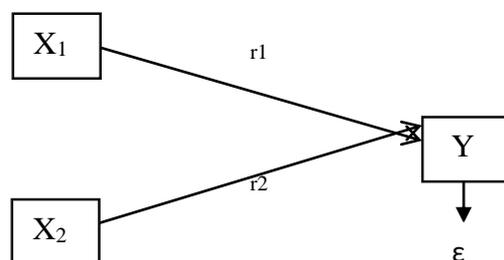
## 3.2 Metode Penelitian

### 3.2.1 Metode Penelitian yang Digunakan

Menurut Sugiyono (2017), Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.

Dalam menjalankan suatu penelitian, untuk mencapai suatu tujuan ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, karena metode merupakan cara utama yang dipergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017), dengan pendekatan studi kasus serta mengambil kasus Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, serta Pinjaman di Kota Tasikmalaya.

Sesuai dengan judul penelitian “Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus Terhadap Desentralisasi Fiskal” maka paradigma penelitiannya adalah:



**Gambar 3.1**  
**Paradigma Penelitian**

Dimana:

$X_1$  = Tingkat Dana Alokasi Umum

$X_2$  = Tingkat Dana Alokasi Khusus

$Y$  = Desentralisasi Fiskal

$\epsilon$  = Variabel yang Tidak Diteliti

### 3.2.2 Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian adalah suatu atribut sifat atau nilai dari orang objek atau kegiatan yang mempunyai variasi yang tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (sugiyono,2017).

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga variabel yang disesuaikan dengan judul yaitu “Pengaruh Tingkat Dana Alokasi Umum dan Tingkat Dana Alokasi Khusus Terhadap Desentralisasi Fiskal”. Ketiga variabel tersebut terdiri dari dua variabel bebas dan satu variabel terikat yang didefinisikan sebagai berikut:

a. *Independent variable* (bebas)

Menurut Sugiyono (2017) “*Independent variable* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya *dependent variable* (terikat) “. Pada penelitian ini yang menjadi *independent variable* adalah sebagai berikut:

- 1) Dana alokasi Umum ( $X_1$ ) adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 11).

2) Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus Daerah yang merupakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 tahun 2019 pasal 1 ayat 11).

b. *Dependent variable* (terikat)

Menurut Sugiyono (2017) “*Dependent variable* adalah variabel yang dipenuhi atau yang menjadi akibat karena adanya *independent variable* (bebas)”.

Pada penelitian ini yang menjadi *dependent variable* adalah sebagai berikut:

1) Desentralisasi Fiskal (Y) adalah perlimpahan wewenang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah atas keputusan anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran suatu Daerah (Purnima, 2014).

**Tabel 3.2**  
**Operasionalisasi Variabel**

| Variabel                                      | Konsep variabel   | Indikator   | Skala |
|---|---|---|-------|
| Tingkat Dana Alokasi Umum (X <sub>1</sub> )   | Tingkat Dana Alokasi Umum merujuk pada proporsi Dana Alokasi Umum dari total Dana Perimbangan, dimana Dana Perimbangan dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.<br><br>(Baihaqi, 2001)     | $\frac{\text{DAU}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$     | Rasio |
| Tingkat Dana Alokasi Khusus (X <sub>2</sub> ) | Tingkat Dana Alokasi Khusus merujuk pada proporsi Dana Alokasi Khusus dari total Dana Perimbangan, dimana Dana Perimbangan dapat bersumber dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil.<br><br>(Baihaqi, 2001) | $\frac{\text{DAK}}{\text{Dana Perimbangan}} \times 100\%$     | Rasio |
| Desentralisasi Fiskal (Y)                     | Perlmpahan wewenang yang dibutuhkan oleh Pemerintah Daerah atas keputusan anggaran yang meliputi penerimaan dan pengeluaran suatu Daerah.<br><br>(Purnima, 2014).   | Pendapatan Asli Daerah<br><br>Transfer Daerah<br><br>Pinjaman | Rasio |

### **3.2.3 Teknik Pengumpulan Data**

#### **3.2.3.1 Jenis Data**

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Pada penelitian ini data sekunder diperoleh dari website Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika.

#### **3.2.3.2 Prosedur Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan, penulis melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

Teknik dokumentasi menurut Arikunto (2010:274) yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda. Dengan cara menelaah dan menganalisa laporan-laporan mengenai Akuntansi Sektor Publik dan Laporan Keuangan Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan dan Badan Pusat Statistika.

### **3.2.4 Teknik Analisis Data dan Prosedur Pengujian Hipotesis**

#### **3.2.4.1 Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017) teknis analisis data adalah kegiatan dari seluruh data sumber lain terkumpul. Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel penelitian responden atau dimana ada dua variabel bebas (*Independent Variable*) yaitu Dana Alokasi Umum ( $X_1$ ) dan Dana Alokasi Khusus ( $X_2$ ) dan satu variabel terikat (*Dependent Variable*) yaitu Desentralisasi Fiskal ( $Y$ ).

### 3.2.4.1.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Teknik yang digunakan adalah Analisis regresi linier berganda digunakan oleh peneliti. Menurut Sugiyono (2017) analisis regresi linier berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel independen dan dua atau lebih variabel independen. Bila peneliti bermaksud meramalkan bagaimana keadaan variabel dependen, bila dua atau lebih variabel independen sebagai faktor prediktor dimanipulasi. Jadi analisis regresi ganda akan dilakukan bila jumlah variabel independennya minimal 2 (dua). Dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$

Sumber: Sugiyono, 2017

Dimana :

Y = Desentralisasi Fiskal

X<sub>1</sub> = Dana Alokasi Umum

X<sub>2</sub> = Dana Alokasi Khusus

a = Konstanta

b<sub>1</sub>, b<sub>2</sub> = koefisien regresi dari masing-masing variabel independen, dimana masing-masing mempunyai interpretasi sebagai rata-rata perubahan yang diharapkan dalam respon Y (negatif / positif) per unit perubahan dalam masing-masing variabel X disebut dengan slope. Adapun untuk menghitung a dan b digunakan program SPSS.

### 3.2.4.1.2 Uji Model/Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah persyaratan statistik yang baru dipenuhi pada analisis regresi linier berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier, misalnya uji multikolinieritas tidak dapat dipergunakan pada analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *cross sectional*. Ada beberapa alat uji yang sering dilakukan dalam uji asumsi klasik diantaranya adalah uji multikolinieritas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan uji normalitas.

Jika terjadi penyimpangan akan asumsi klasik digunakan pengujian statistik non parametrik sebaliknya asumsi klasik terpenuhi apabila digunakan statistik parametrik untuk mendapatkan model regresi yang baik, model regresi tersebut harus terbebas dari multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas. Cara yang digunakan untuk menguji penyimpangan asumsi klasik adalah sebagai berikut:

#### a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah dalam model regresi, baik variabel dependen maupun independennya terdistribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang terdistribusi normal. Uji normalitas dapat dilakukan dengan uji histogram, uji normal P Plot, *Skewness* dan *Kurtosis* atau uji *Kolmogorov Smirnov*. Tidak ada metode yang buruk atau tidak tepat.

Pada pengujian normalitas, untuk mengetahui apakah residunya berdistribusi secara normal sesuai asumsi regresi dengan BLUE (*Best Linear Unbiased Estimator*). Cara untuk menentukan data berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan rasio *skewness* dan rasio *kurtosis* dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data berdistribusi normal atau tidak. Rasio *skewness* adalah nilai *skewness* dibagi dengan *standard error skewness*, sedangkan rasio *kurtosis* adalah nilai *kurtosis* dibagi dengan *standard error kurtosis*. Sebagai pedoman, bila rasio *kurtosis* dan *skewness* berada diantara -2 hingga +2 maka distribusi data adalah normal.

b. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah terjadinya hubungan linear yang sempurna yang pasti ada perubahan-perubahan bebas. Untuk menentukan apakah suatu model memiliki gejala multikolinieritas yaitu dengan cara uji korelasi yaitu dengan melihat keeratan antara hubungan dua (2) variabel penjelas.

c. Uji Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi apabila variabel gangguan tidak mempunyai varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya varian yang sama untuk semua observasi. Akibat dari adanya heteroskedastisitas, penaksiran OLS tetap tidak bisa tetapi tidak efisien. Untuk menentukan apakah suatu model terbebas dari masalah heteroskedastisitas atau tidak, salah satunya dengan uji *Glesjer*. Uji *Glesjer* secara umum dinotasikan sebagai berikut:

$$le/ = b_1 + b_2X_2 + v$$

Sumber: Sugiyono, 2017

Dimana:

$|e/$  = Nilai Absolut dari residual yang dihasilkan dari regresi model

$X_2$  = Variabel Penjelas

Bila variabel penjelas secara statistik signifikan mempengaruhi residual maka dapat dipastikan model ini memiliki masalah heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Autokorelasi merupakan korelasi (hubungan) yang terjadi diantara anggota-anggota dari serangkaian pengamatan yang tersusun dalam rangkaian waktu. Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi salah satunya dengan uji *Durbin Waston (DW test)*. Uji ini hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat satu (*first Order Autocorelation*) dan mensyaratkan adanya *intercept* dalam model regresi dan tidak ada variabel *log* diantara variabel penjelas.

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah sebagai berikut:

1. Bila nilai DW berada diantara  $d_u$  sampai dengan  $4-d_u$  maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, tidak ada autokorelasi
2. Bila nilai DW lebih kecil daripada  $d_L$ , koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol. Artinya ada autokorelasi positif.
3. Bila nilai DW terletak diantara  $d_L$  dan  $d_u$  maka tidak dapat disimpulkan
4. Bila nilai DW lebih besar daripada  $4-d_L$ , koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya autokorelasi negatif.
5. Bila nilai DW terletak antara  $4-d_u$  dan  $4-d_L$ , maka tidak dapat disimpulkan.

### 3.2.4.1.3 Koefisien Determinasi

Untuk menentukan besarnya pengaruh suatu variabel independen ( $X_1, X_2$ ) terhadap ( $Y$ ) dapat digunakan koefisien determinasi yang dihitung dengan menggunakan rumus:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber: Sugiyono, 2017

Dimana:

$Kd$  = Koefisien determinasi

$r^2$  = Koefisien korelasi

Besarnya koefisien determinasi ( $r^2$ ) terletak antara 0 dan 1 atau antara 0% sampai dengan 100%. Sebaliknya jika  $r^2 = 0$ , model tadi tidak menjelaskan sedikitpun pengaruh variasi variabel  $X$  terhadap variasi variabel  $Y$ . Kecocokan model dikatakan lebih baik jika  $r^2$  semakin dekat dengan 1. Jadi untuk batas koefisien determinasi adalah  $0 \leq r^2 \leq 1$ .

### 3.2.4.2 Prosedur Pengujian Hipotesis

Hipotesis yang akan diuji dan dibuktikan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh dari variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengujian hipotesis yang dilakukan adalah pengujian hipotesis nol ( $H_0$ ) yang menyatakan bahwa koefisien korelasi tidak berarti atau tidak signifikan sedangkan hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa koefisien korelasinya berarti atau signifikan.

Adapun pengujian hipotesis penelitian yang akan penulis lakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Hipotesis Operasional

Hipotesis yang digunakan adalah:

1) Hipotesis Simultan

$H_0: \rho = 0$  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Desentralisasi Fiskal Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 – 2016.

$H_a: \rho > 0$  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara simultan berpengaruh signifikan positif terhadap Desentralisasi Fiskal Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 – 2016.

2) Hipotesis Parsial

$H_0: \rho = 0$  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap Desentralisasi Fiskal Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 – 2016.

$H_a: \rho > 0$  Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap Desentralisasi Fiskal Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2007 – 2016.

b. Penetapan Tingkat Signifikan

Tarif signifikan ( $\alpha$ ) ditetapkan sebagai 5% ini berarti kemungkinan kebenaran hasil penarikan kesimpulan mempunyai profitabilitas 95% = ( $\alpha = 0.05$ ) dengan tingkat kesalahan adalah 5%. Tarif signifikansi adalah tingkat yang umum digunakan dalam penelitian karena dianggap cukup ketat untuk mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti.

c. Keputusan

1) Secara parsial

Jika signifikansi  $t < (\alpha = 0.05)$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Jika signifikansi  $t \geq (\alpha = 0.05)$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

2) Secara simultan

Jika signifikansi  $F < (\alpha = 0.05)$  maka  $H_0$  ditolak  $H_a$  diterima.

Jika signifikansi  $F \geq (\alpha = 0.05)$  maka  $H_0$  diterima  $H_a$  ditolak.

d. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pengujian hipotesis, penulis akan menganalisa kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis yang telah ditetapkan itu diterima atau ditolak.